



KEPEMIMPINAN DALAM KRISIS: MENILIK KESESUAIAN NILAI ISLAM DENGAN PRAKTIK KEKUASAAN DI INDONESIA

Aulia Kiftiah Kencana¹⁾, Sartina Wati²⁾, Abdul Syahid³⁾, Dakir⁴⁾

¹²³⁴Magister Manajemen Pendidikan Islam, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia

Email: kifti2410130412pasca@iain-palangkaraya.ac.id¹⁾, sartinawati676@gmail.com²⁾, abdul.syahid@iain-palangkaraya.ac.id³⁾, dakir@iain-palangkaraya.ac.id⁴⁾

Abstrak: Krisis kepemimpinan di Indonesia menjadi isu yang semakin memprihatinkan, ditandai dengan meningkatnya korupsi, lemahnya penegakan hukum, serta menurunnya kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan, mengkaji berbagai literatur dan studi terdahulu yang relevan. Hasil penelitian Kepemimpinan di Indonesia saat ini menghadapi krisis dalam penerapan nilai-nilai inti kepemimpinan Islam, seperti amanah, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Meskipun ajaran Islam menekankan pentingnya menjaga kepercayaan rakyat dan bertindak adil, praktik korupsi dan ketidakadilan yang meluas menunjukkan bahwa nilai-nilai ini sering kali diabaikan. Selain itu, pengabaian terhadap kelestarian lingkungan dan hak-hak masyarakat adat mencerminkan kurangnya tanggung jawab sosial dari pemimpin, yang lebih mementingkan kepentingan politik dan ekonomi jangka pendek. Oleh karena itu, untuk mencapai kepemimpinan yang efektif dan berintegritas, perlu ada upaya yang lebih kuat untuk menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan Islam dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya, demi kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Kata Kunci : *Kepemimpinan, Nilai Islam, Kekuasaan*

Abstract: The leadership crisis in Indonesia has become an increasingly concerning issue, marked by increasing corruption, weak law enforcement, and declining public welfare. This research uses a qualitative method with a literature approach, reviewing various relevant literature and previous studies. The results of the research on Leadership in Indonesia are currently facing a crisis in the application of the core values of Islamic leadership, such as trust, justice, and social responsibility. Although Islamic teachings emphasize the importance of safeguarding the people's trust and acting fairly, widespread practices of corruption and injustice show that these values are often overlooked. In addition, the neglect of environmental sustainability and the rights of indigenous peoples reflects a lack of social responsibility from leaders, who are more concerned with short-term political and economic interests. Therefore, to achieve effective leadership and integrity, there needs to be a stronger effort to apply Islamic leadership principles in decision-making and resource management, for the welfare of the community and environmental sustainability.

Keywords : *Leadership, Islamic Values, Power*

A. Pendahuluan

Kepemimpinan adalah usaha untuk mengarahkan, mempengaruhi, memotivasi, dan mengendalikan anggota tim dengan metode tertentu, agar mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara baik, efektif, dan efisien. Kepemimpinan di Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Lemahnya kesadaran para pemimpin negara dalam menjalankan roda pemerintahan menjadi alasan mendasar. Fenomena ini terlihat dari meningkatnya korupsi dan pengabaian terhadap kesejahteraan masyarakat, yang berujung pada menurunnya kepercayaan publik terhadap pemimpin. Menurut penelitian oleh Utaminingsih, kepemimpinan yang baik seharusnya mampu mengayomi masyarakat dan meningkatkan perekonomian negara,

namun kenyataannya banyak pemimpin yang lebih mementingkan kepentingan pribadi dan terlibat dalam praktik korupsi.¹ Hal ini menciptakan jarak antara pemimpin dan rakyat, yang pada gilirannya memicu apatisme politik, seperti tingginya angka golput dalam pemilu, yang mencerminkan ketidakpercayaan rakyat terhadap pemimpin mereka.

Penyalahgunaan kekuasaan di Indonesia telah menjadi masalah yang meluas, terutama di kalangan pejabat publik. Salah satu dari sekian banyaknya kasus yaitu kasus Penyalahgunaan Wewenang Mantan Staf Khusus Kepresidenan Milenial tanggal 16 April 2020. Hal ini menunjukkan bahwa individu yang memiliki kekuasaan sering kali menggunakan posisi mereka untuk keuntungan pribadi. Misalnya, anggota DPR kerap terlibat dalam praktik korupsi, dengan banyak dari mereka tidak pernah jera meskipun telah ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kasus-kasus seperti ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan kekuasaan bukan hanya tindakan individu, tetapi juga mencerminkan sistem yang lemah dalam pengawasan dan penegakan hukum. Lembaga Survei Indonesia (LSI) per Maret 2023 menyatakan hampir 30% publik menilai bahwa penegakan hukum di Indonesia itu buruk. Ketidakpuasan masyarakat ini menciptakan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat terhadap sistem hukum yang seharusnya melindungi mereka dan menjadi pertanda lemahnya penegakan hukum di Indonesia.

Praktik korupsi juga semakin merajalela yang memiliki dampak terhadap ekonomi yang signifikan. Data dari *Indonesian Corruption Watch* (ICW) menunjukkan bahwa kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp238,14 triliun selama dekade terakhir. Praktik korupsi ini tidak hanya mengakibatkan kerugian finansial, tetapi juga memperburuk kesenjangan ekonomi di masyarakat. Ketika anggaran untuk pembangunan disalahgunakan, pertumbuhan ekonomi terhambat, dan indeks kemiskinan tidak mengalami perbaikan. Kesenjangan ekonomi di Indonesia semakin melebar akibat praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Sementara segelintir orang menikmati kekayaan hasil dari penyalahgunaan kekuasaan, mayoritas masyarakat masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Hal ini menciptakan ketidakpuasan sosial yang dapat memicu konflik dan ketidakstabilan di masa mendatang.

Krisis kepemimpinan di Indonesia yang berulang kali muncul menimbulkan pertanyaan besar: sejauh mana nilai-nilai kepemimpinan Islam diterapkan dalam praktik kekuasaan di Indonesia? Kepemimpinan Islam, idealnya pemimpin harus berpegang pada prinsip-prinsip keadilan, amanah, kesederhanaan, dan tanggung jawab sosial. Sejarah mencatat bahwa pemimpin-pemimpin Islam seperti Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin memberikan teladan yang baik dalam hal kepemimpinan yang berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat. Penelitian oleh Subaidi menunjukkan bahwa kepemimpinan yang berbasis nilai-nilai Islam dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam kegiatan yang mendukung nilai-nilai tersebut.² Penelitian oleh Pradana juga menjelaskan bahwa krisis dalam tatanan liberal internasional juga telah menambah pengaruh akan struktur dan perilaku kepemimpinan Indonesia di ASEAN.³ Hal ini menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai Islam dalam kepemimpinan tidak hanya harus direlevansikan dalam pendidikan, tetapi juga pada pemerintahan.

Penelitian ini penting untuk dilakukan untuk dapat membantu menganalisis sejauh mana prinsip-prinsip kepemimpinan Islam diterapkan dalam praktik kekuasaan di Indonesia, terutama di tengah krisis kepercayaan publik dan meningkatnya korupsi. Dengan mengidentifikasi kesenjangan

¹ S. Utaminingsih, "Peran Budaya Organisasi Dalam Membentuk Sikap Tanggung Jawab Sosial Guru Paud," *Jurnal Obsesi Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 7, no. 6 (2023).

² S. Subaidi, "Empowering Islamic Values: The Role of Madrasah Head Leadership in Extracurricular Enrichment," *Al-Tanzim Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 8, no. 2 (2024).

³ R. Pradana, "Indonesia-Asean Institutional Roles and Challenges in the Crisis of the Liberal Order.," *Interstemic Journal of International Studies* 7, no. 2 (2023).

antara nilai-nilai ideal dan realitas, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga untuk pengembangan kebijakan dan strategi kepemimpinan yang lebih efektif dan akuntabel. Selain itu, penelitian ini juga berpotensi mendorong dialog dan refleksi di antara para pemimpin dan masyarakat mengenai pentingnya integritas dan keadilan dalam kepemimpinan, sehingga dapat memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi di Bumi Pertawi.

B. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan, atau yang sering disebut sebagai library research, merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber tertulis sehingga mampu untuk mengeksplorasi dan memahami topik yang diteliti melalui kajian literatur yang ada. Penelitian kepustakaan dapat mencakup berbagai jenis sumber, seperti buku, artikel jurnal, tesis, disertasi, dan dokumen resmi lainnya yang relevan dengan topik penelitian.⁴

C. Temuan Data dan Diskusi

1. Praktik Kekuasaan di Indonesia

Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial yang ditandai dengan pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Prinsip "*checks and balances*" diharapkan dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan, namun dalam praktiknya, masih terdapat kebutuhan untuk memperjelas batasan kekuasaan dan wewenang masing-masing lembaga negara. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka konstitusi telah ada, implementasi di lapangan memerlukan penyempurnaan agar dapat berfungsi secara efektif.

Praktik kepemimpinan dan kekuasaan di Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan yang mencerminkan kondisi yang tidak ideal. Korupsi menjadi salah satu masalah mendasar yang menghambat kemajuan dan reformasi di berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.⁵ Menurut penelitian yang dilakukan oleh Naomi et al. selama pandemi COVID-19, kesempatan untuk melakukan korupsi meningkat seiring dengan lemahnya sistem pengawasan terhadap penggunaan dana publik.⁶ Salah satu contohnya adalah kasus mantan Menteri Sosial Juliari Batubara, yang terjerat dalam skandal korupsi pengadaan bantuan sosial COVID-19.

Ketidakadilan dalam penegakan hukum juga menjadi sorotan. Banyak kasus hukum yang tidak ditangani secara adil, terutama yang melibatkan masyarakat kecil, sementara pelaku korupsi besar sering kali lolos dari jeratan hukum.⁷ Hal ini menciptakan persepsi bahwa hukum hanya berlaku bagi mereka yang lemah, sementara yang kuat dapat dengan mudah menghindari konsekuensi dari tindakan mereka. Banyak pemimpin yang lebih mempertahankan status quo untuk melindungi kepentingan pribadi dan kelompok mereka.⁸ Hal ini menciptakan

⁴ K. Benuf and M. Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Ermasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020).

⁵ M. Shalahudin, "Kepemimpinan Perubahan Pada Sekolah Dasar Islam Terpadu Di Era Disrupsi," *Jentre* 4, no. 2 (2023).

⁶ P. Naomi, I. Akbar, and F. Annas, "Corruption and Demography during the Covid-19 Pandemic in Indonesia" (2022).

⁷ W. Suyatmiko, "Memaknai Turunnya Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2020," *Integritas Jurnal Antikorupsi* 7, no. 1 (2021).

⁸ A. Ahmad, H. Sijabat, and U. Manor, "Pemberantasan Di Persimpangan Jalan: Principal Agent Dan Collective Action Sebagai Jalan Tengah Pemberantasan Korupsi Di Indonesia," *Salus Cultura Jurnal Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan* 2, no. 1 (2022).

ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah yang sering kali dianggap tidak transparan dan tidak akuntabel. Hal ini terlihat dari meningkatnya kritik terhadap kebijakan publik yang dianggap tidak berpihak pada kepentingan rakyat.⁹

Ketimpangan sosial dan ekonomi juga menjadi faktor yang memperburuk situasi. Masyarakat yang terpinggirkan sering kali tidak mendapatkan akses yang sama terhadap layanan publik dan kesempatan ekonomi, menciptakan jurang pemisah yang semakin lebar antara kelompok kaya dan miskin.¹⁰ Hal ini mencerminkan kegagalan dalam implementasi kebijakan desentralisasi yang seharusnya memberikan kekuasaan lebih kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dan melayani masyarakat dengan lebih baik.¹¹

2. Nilai-nilai Islam dalam Kepemimpinan

Kepemimpinan dalam Islam, terdapat sejumlah nilai-nilai tidak hanya mencakup aspek moral dan etika, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip kepemimpinan yang dapat diterapkan dalam berbagai konteks, baik dalam pendidikan, organisasi, maupun masyarakat luas.

a. Keadilan

Keadilan merupakan salah satu nilai fundamental dalam kepemimpinan Islam yang berperan penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam konteks hukum, pendidikan, dan sosial. Dalam Islam, keadilan tidak hanya dipandang sebagai prinsip moral, tetapi juga sebagai suatu kewajiban yang harus diterapkan dalam setiap tindakan dan keputusan. Keadilan menjadi landasan bagi pembuatan dan pelaksanaan hukum, termasuk dalam isu-isu yang kompleks seperti poligami, di mana keadilan menjadi syarat utama dalam formulasi hukum.¹² Dalam pendidikan Islam, kepemimpinan yang adil sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Kepemimpinan transformasional dalam pendidikan Islam, yang mengedepankan nilai-nilai keadilan, berperan dalam mendorong lembaga pendidikan untuk beradaptasi dengan perubahan dan tantangan yang ada.¹³ (Pemimpin yang adil akan mampu membimbing dan memotivasi sumber daya manusia untuk mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas, dengan menempatkan keadilan sebagai prinsip utama dalam pengambilan keputusan.¹⁴ Hal ini menunjukkan bahwa keadilan tidak hanya penting dalam konteks hukum, tetapi juga dalam manajemen pendidikan yang berorientasi pada pengembangan mutu.

Keadilan dalam Islam juga mencakup aspek sosial, di mana prinsip moral dan keadilan sosial harus diperhatikan dalam berbagai keputusan, termasuk dalam pembagian harta dan kewarisan.¹⁵ Dalam hal ini, keadilan tidak hanya diukur dari kesamaan, tetapi juga dari proporsionalitas berdasarkan tanggung jawab yang diemban oleh masing-masing

⁹ H. Prihanto and W. Watriningsih, "Bagaimana Kecurangan Terjadi Di Organisasi Publik?," *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Indonesia (Jabisi)* 1, no. 1 (2020).

¹⁰ M. Farkhan, "Dari Keberagaman Entitas Menjadi Ketimpangan Multisektor Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 12, no. 3 (2023).

¹¹ C. Rosika, "Desentralisasi Dan Inovasi Pemerintah: Membangun Model Pemerintahan Lokal Yang Berkelanjutan," *Comserva Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 8 (2023).

¹² U. Rosida, "Keadilan Dalam Hukum Islam Dan Urgensinya Terhadap Perkara Poligami," *Khuluqiyya Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam* (2023).

¹³ L. Fadilah and T. Hamami, "Kepemimpinan Transformasional Dalam Pendidikan Islam," *Edukatif Jurnal Ilmu Pendidikan* 3, no. 6 (2021).

¹⁴ D. Wahyudi, C. Kamila, and S. Agustin, "Peran Kepemimpinan Dalam Pengembangan Mutu Pendidikan Islam," *Jurnal Syntax Transformation* 2, no. 7 (2021).

¹⁵ W. Umar, "Pembagian Harta Bersama Dalam Perspektif Hukum Islam: Implementasi Moral Justice Dan Social Justice," *Jurnal Al-Ahkam Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, no. 1 (2023).

individu.¹⁶ Konsep keadilan ini juga tercermin dalam pendekatan restorative justice yang diadopsi dalam hukum Islam, di mana penyelesaian konflik tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban.¹⁷ Keadilan menjadi landasan yang mengikat semua aspek untuk memastikan bahwa setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh pemimpin selalu berorientasi pada kesejahteraan dan hak-hak semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, penerapan nilai keadilan dalam kepemimpinan Islam tidak hanya berfungsi untuk mencapai tujuan organisasi, tetapi juga untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

b. Amanah

Amanah atau kepercayaan merupakan salah satu nilai kunci dalam kepemimpinan Islam yang sangat penting dalam membangun integritas dan kredibilitas seorang pemimpin. Dalam kepemimpinan, amanah tidak hanya mencakup kejujuran dan tanggung jawab, tetapi juga melibatkan pengelolaan sumber daya dan keputusan yang adil serta transparan. Konsep amanah dalam Islam berakar dari ajaran Al-Qur'an dan Hadis, yang menekankan bahwa pemimpin harus dapat dipercaya dan bertanggung jawab atas segala tindakan dan keputusan yang diambil.¹⁸ Amanah dianggap sebagai kewajiban moral yang harus dipenuhi oleh setiap individu, terutama oleh mereka yang memegang posisi kepemimpinan.

Amanah juga berhubungan erat dengan nilai-nilai etika dan moral yang harus dipegang oleh seorang pemimpin. Pemimpin yang amanah akan berusaha untuk memenuhi hak-hak orang yang dipimpin dan menjaga keadilan dalam setiap keputusan yang diambil.¹⁹ Amanah tidak hanya dilihat sebagai tanggung jawab individu, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab sosial yang lebih luas. Pemimpin yang memahami dan menerapkan nilai amanah akan mampu menciptakan lingkungan yang harmonis dan saling mendukung, yang pada gilirannya akan meningkatkan efektivitas organisasi dan kepuasan masyarakat.²⁰

c. Tanggung Jawab

Tanggung jawab yang bermakna konsekuensi dari amanah. Seorang pemimpin yang amanah akan merasa bertanggung jawab untuk memenuhi harapan dan kebutuhan orang-orang yang dipimpinnya. Tanggung jawab tidak hanya terbatas pada aspek duniawi, tetapi juga mencakup tanggung jawab ukhrawi. Pemimpin harus menyadari bahwa setiap keputusan dan tindakan yang diambil akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Dalam Islam, pemimpin dianggap sebagai wakil Allah di bumi (khalifah), yang berarti mereka harus bertindak dengan penuh kesadaran akan tanggung jawab moral dan spiritual yang diemban.²¹ Dalam praktik kepemimpinan, tanggung jawab juga berkaitan dengan kemampuan pemimpin untuk membimbing dan memotivasi orang-orang yang dipimpin. Pemimpin yang bertanggung jawab akan berusaha untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan memberdayakan pengikutnya, sehingga mereka dapat berkontribusi secara

¹⁶ Z. Darussamin, "Analisis Hadis-Hadis 'ashâbah Dalam Konteks Kewarisan Islam (Studi Terhadap Pemaknaan Dan Implementasi)," *Al Quds Jurnal Studi Alquran Dan Hadis* 7, no. 2 (2023).

¹⁷ B. Panjaitan, "Perlindungan Korban Dalam Kasus Pembunuhan Dan Penganiayaan Berdasarkan Hukum Islam Dan Hubungannya Dengan Restorative Justice," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 7, no. 1 (2022).

¹⁸ A. Razak, "Islamic Leadership for Sustainability: A Systematic Literature Review Using Prisma," *OJIMF* 22 (2022).

¹⁹ N. Ayub, M. Hamzah, and K. Razak, "The Practice of Ta'dib Leadership among Islamic Education Teachers," *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 10, no. 3 (2020).

²⁰ A. Mauludah, "Konsep Kepemimpinan Pendidikan Islam Perspektif Muhammad Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Mishbah," *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 11 (2023).

²¹ Wahyudi, Kamila, and Agustini, "Peran Kepemimpinan Dalam Pengembangan Mutu Pendidikan Islam."

maksimal dalam mencapai tujuan bersama.²² Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip kepemimpinan yang diajarkan dalam Islam, di mana pemimpin diharapkan untuk menjadi teladan dalam perilaku dan tindakan, serta menjaga hubungan yang baik dengan pengikutnya.²³ Dalam konteks pendidikan, misalnya, seorang pemimpin pendidikan harus bertanggung jawab dalam mengembangkan kurikulum dan metode pengajaran yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, serta memastikan bahwa semua siswa mendapatkan pendidikan yang berkualitas.²⁴

Tanggung jawab dalam kepemimpinan Islam juga mencakup aspek sosial dan lingkungan. Pemimpin yang bertanggung jawab akan berupaya untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan menjaga kesejahteraan lingkungan (Widyastuti, 2022). Dalam hal ini, tanggung jawab tidak hanya dilihat sebagai kewajiban individu, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab sosial yang lebih luas. Pemimpin yang memahami dan menerapkan nilai tanggung jawab akan mampu menciptakan lingkungan yang harmonis dan saling mendukung, yang pada gilirannya akan meningkatkan efektivitas organisasi dan kepuasan masyarakat.²⁵

Secara keseluruhan, tanggung jawab sebagai nilai kepemimpinan Islam mencerminkan pentingnya integritas, kejujuran, dan akuntabilitas dalam setiap aspek kepemimpinan. Dengan menerapkan nilai tanggung jawab, pemimpin tidak hanya dapat membangun kepercayaan di antara pengikutnya, tetapi juga berkontribusi pada penciptaan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Oleh karena itu, tanggung jawab harus menjadi landasan dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin dalam konteks Islam.

3. Kesesuaian antara nilai-nilai Islam dan praktik kekuasaan di Indonesia

Kesesuaian antara nilai-nilai Islam dan praktik kekuasaan di Indonesia merupakan topik yang kompleks dan multidimensional. Penelitian akan mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan, amanah, dan tanggung jawab, dapat diintegrasikan dalam praktik pemerintahan dan bagaimana tantangan yang ada dapat diatasi untuk mencapai tujuan tersebut. Nilai keadilan dalam Islam sangat penting untuk diterapkan dalam praktik kekuasaan. Washudin menekankan bahwa kepemimpinan yang baik dalam Islam harus berorientasi pada penegakan keadilan, yang merupakan bagian integral dari manajemen yang efektif dalam konteks sosial dan politik. Namun, dalam praktiknya, ketidakadilan dalam penegakan hukum sering kali terjadi, di mana pelaku korupsi besar sering kali lolos dari jeratan hukum, sementara masyarakat kecil tidak mendapatkan perlakuan yang adil.²⁶ Hal ini menunjukkan bahwa meskipun nilai keadilan diharapkan dapat diimplementasikan, tantangan dalam praktiknya masih sangat besar.

Amanah sebagai nilai utama dalam kepemimpinan Islam juga harus diperhatikan. Pemimpin diharapkan untuk menjaga kepercayaan yang diberikan kepada mereka, baik dalam pengelolaan sumber daya maupun dalam interaksi dengan masyarakat. Namun, dalam

²² A. Lailiyah, R. Fajarani, and F. Mubiina, "Konsep Kepemimpinan Dalam Menciptakan Manajemen Pendidikan Islam Yang Baik," *Jurnal Pendidikan Indonesia* 2, no. 7 (2021).

²³ H. Zaim et al., "The Influence of Islamic Leadership on Work Performance in Service Industry: An Empirical Analysis," *International Journal of Ethics and Systems* 40, no. 1 (2022).

²⁴ Fadilah and Hamami, "Kepemimpinan Transformasional Dalam Pendidikan Islam."

²⁵ K. Ogunsola, S. Sarif, and R. Fonatine, "Islamic Performance Instrument (Ipi): An Alternative Servant Leadership (Sl) Tool for Sustainable Development Goals (Sdgs)," *International Journal of Islamic Business Ethics* 5, no. 1 (2020).

²⁶ H. Khairunnisa, "Mapping on Islamic Microfinance Research: Lesson Learn from Indonesia and Turkey," *ES* 1, no. 1 (2024).

praktiknya, banyak pemimpin yang lebih mempertahankan status quo untuk melindungi kepentingan pribadi dan kelompok mereka, yang menciptakan ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Ini menunjukkan bahwa penerapan nilai amanah dalam praktik kekuasaan masih memerlukan perhatian lebih lanjut. Ajaran Nabi Muhammad SAW menekankan pentingnya menjaga lingkungan dan merawat sesama manusia. Namun, kebijakan pembangunan di Indonesia sering kali mengabaikan kelestarian lingkungan dan hak-hak masyarakat adat, yang bertentangan dengan ajaran Islam. Pengabaian terhadap isu-isu lingkungan ini menyoroti bahwa pemimpin sering kali lebih mementingkan kepentingan politik dan ekonomi jangka pendek daripada tanggung jawab sosial yang lebih luas. Amanah sebagai salah satu nilai inti dalam kepemimpinan Islam, mengharuskan pemimpin untuk menjaga kepercayaan rakyat. Namun, korupsi yang meluas di berbagai tingkat pemerintahan menunjukkan bahwa nilai amanah sering kali diabaikan. Penelitian oleh Utaminingsih menyoroti pentingnya transparansi dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya negara, yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemimpin.²⁷ Ketidakadilan ini tidak hanya melanggar hukum negara, tetapi juga bertentangan dengan ajaran Islam tentang kejujuran dan keadilan.

Tanggung jawab juga merupakan aspek penting yang harus diintegrasikan dalam praktik kekuasaan. Dalam pandangan Islam, pemimpin harus menyadari bahwa setiap keputusan dan tindakan yang diambil akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Namun, dalam pemerintahan Indonesia, sering kali terdapat kesenjangan antara harapan masyarakat akan tanggung jawab pemimpin dan kenyataan yang ada, di mana banyak kebijakan publik dianggap tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Praktik kekuasaan di Indonesia juga harus mempertimbangkan nilai-nilai ekonomi Islam, yang dapat berkontribusi pada pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Guritno et al. menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat berkontribusi pada kesejahteraan dan demokrasi yang lebih baik, sejalan dengan ideologi Pancasila.²⁸ Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam kebijakan ekonomi, diharapkan dapat mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi yang masih menjadi masalah di Indonesia.²⁹

Integrasi nilai-nilai Islam dalam kebijakan publik juga merupakan langkah penting untuk menciptakan pemerintahan yang lebih adil dan transparan. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat berkontribusi pada pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Guritno dkk menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat membantu mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi, yang merupakan salah satu tantangan utama di Indonesia.³⁰ Sebagai contoh, program-program berbasis zakat, infaq, dan sadaqah (ZIS) dapat dioptimalkan untuk membantu masyarakat yang kurang beruntung. Selain itu, pengembangan lembaga keuangan syariah juga dapat memberikan akses yang lebih baik bagi masyarakat terhadap layanan keuangan, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam kebijakan publik, diharapkan dapat tercipta pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Meskipun terdapat potensi besar untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam praktik kekuasaan di Indonesia, tantangan yang ada tidak dapat diabaikan. Korupsi,

²⁷ Utaminingsih, "Peran Budaya Organisasi Dalam Membentuk Sikap Tanggung Jawab Sosial Guru Paud."

²⁸ B. Guritno et al., "Culture of Islamic Economic Principles and Democracy and Welfare Based on Pancasila Ideology," *Journal of Intercultural Communication* (2023).

²⁹ I. Suryani et al., "Integration of Islamic Law in Regional Development in Indonesia," *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)* 22, no. 1 (2023).

³⁰ Guritno et al., "Culture of Islamic Economic Principles and Democracy and Welfare Based on Pancasila Ideology."

ketidakadilan dalam penegakan hukum, dan ketimpangan sosial masih menjadi masalah yang mendesak. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari para pemimpin untuk menerapkan prinsip-prinsip keadilan, amanah, dan tanggung jawab dalam setiap aspek pemerintahan. Peluang untuk memperbaiki praktik kekuasaan juga ada, terutama melalui pendidikan dan kesadaran masyarakat. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Islam dan pentingnya penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam pemerintahan dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, masyarakat dapat berperan sebagai pengawas dan pengontrol terhadap tindakan pemerintah, sehingga tercipta pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

D. Kesimpulan

Kesesuaian antara nilai-nilai Islam dan praktik kekuasaan di Indonesia merupakan tantangan yang kompleks namun penting untuk diatasi. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan, amanah, dan tanggung jawab dalam setiap aspek pemerintahan, diharapkan dapat tercipta pemerintahan yang lebih baik, lebih transparan, dan lebih akuntabel. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam proses ini, dan peningkatan kesadaran serta partisipasi masyarakat dapat menjadi kunci untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian, nilai-nilai Islam tidak hanya menjadi landasan moral, tetapi juga menjadi pedoman praktis untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baik di Indonesia.

E. Daftar Kepustakaan

- Ahmad, A., H. Sijabat, and U. Manor. "Pemberantasan Di Persimpangan Jalan: Principal Agent Dan Collective Action Sebagai Jalan Tengah Pemberantasan Korupsi Di Indonesia." *Salus Cultura Jurnal Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan* 2, no. 1 (2022).
- Ayub, N., M. Hamzah, and K. Razak. "The Practice of Ta'dib Leadership among Islamic Education Teachers." *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 10, no. 3 (2020).
- Benuf, K., and M. Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Ermasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020).
- Darussamin, Z. "Analisis Hadis-Hadis 'ashâbah Dalam Konteks Kewarisan Islam (Studi Terhadap Pemaknaan Dan Implementasi)." *Al Quds Jurnal Studi Alquran Dan Hadis* 7, no. 2 (2023).
- Fadilah, L., and T Hamami. "Kepemimpinan Transformasional Dalam Pendidikan Islam." *Edukatif Jurnal Ilmu Pendidikan* 3, no. 6 (2021).
- Farkhan, M. "Dari Keberagaman Entitas Menjadi Ketimpangan Multisektor Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 12, no. 3 (2023).
- Guritno, B., R. Dewi, F. Arianti, A. Utama, N. Norvadewi, O. Anggara, and A. Andiyan. "Culture of Islamic Economic Principles and Democracy and Welfare Based on Pancasila Ideology." *Journal of Intercultural Communication* (2023).
- Khairunnisa, H. "Mapping on Islamic Microfinance Research: Lesson Learn from Indonesia and Turkey." *ES* 1, no. 1 (2024).
- Lailiyah, A., R. Fajarani, and F. Mubiina. "Konsep Kepemimpinan Dalam Menciptakan Manajemen Pendidikan Islam Yang Baik." *Jurnal Pendidikan Indonesia* 2, no. 7 (2021).

- Mauludah, A. "Konsep Kepemimpinan Pendidikan Islam Perspektif Muhammad Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Mishbah." *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 11 (2023).
- Naomi, P., I. Akbar, and F. Annas. "Corruption and Demography during the Covid-19 Pandemic in Indonesia" (2022).
- Ogunsola, K., S. Sarif, and R. Fonatine. "Islamic Performance Instrument (Ipi): An Alternative Servant Leadership (Sl) Tool for Sustainable Development Goals (Sdgs)." *International Journal of Islamic Business Ethics* 5, no. 1 (2020).
- Panjaitan, B. "Perlindungan Korban Dalam Kasus Pembunuhan Dan Penganiayaan Berdasarkan Hukum Islam Dan Hubungannya Dengan Restorative Justice." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 7, no. 1 (2022).
- Pradana, R. "Indonesia-Asean Institutional Roles and Challenges in the Crisis of the Liberal Order." *Intermestic Journal of International Studies* 7, no. 2 (2023).
- Prihanto, H., and W. Watriningsih. "Bagaimana Kecurangan Terjadi Di Organisasi Publik?" *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Indonesia (Jabisi)* 1, no. 1 (2020).
- Razak, A. "Islamic Leadership for Sustainability: A Systematic Literature Review Using Prisma." *OJIMF* 22 (2022).
- Rosida, U. "Keadilan Dalam Hukum Islam Dan Urgensinya Terhadap Perkara Poligami." *Khuluqiyya Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam* (2023).
- Rosika, C. "Desentralisasi Dan Inovasi Pemerintah: Membangun Model Pemerintahan Lokal Yang Berkelanjutan." *Comserva Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 8 (2023).
- Shalahudin, M. "Kepemimpinan Perubahan Pada Sekolah Dasar Islam Terpadu Di Era Disrupsi." *Jentre* 4, no. 2 (2023).
- Subaidi, S. "Empowering Islamic Values: The Role of Madrasah Head Leadership in Extracurricular Enrichment." *Al-Tanzim Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 8, no. 2 (2024).
- Suryani, I., M. Muhtar, Y. Rahman, B. Jaya, and A. Khalaf. "Integration of Islamic Law in Regional Development in Indonesia." *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)* 22, no. 1 (2023).
- Suyatmiko, W. "Memaknai Turunnya Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2020." *Integritas Jurnal Antikorupsi* 7, no. 1 (2021).
- Umar, W. "Pembagian Harta Bersama Dalam Perspektif Hukum Islam: Implementasi Moral Justice Dan Social Justice." *Jurnal Al-Ahkam Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, no. 1 (2023).
- Utaminingsih, S. "Peran Budaya Organisasi Dalam Membentuk Sikap Tanggung Jawab Sosial Guru Paud." *Jurnal Obsesi Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 7, no. 6 (2023).
- Wahyudi, D., C. Kamila, and S. Agustin. "Peran Kepemimpinan Dalam Pengembangan Mutu Pendidikan Islam." *Jurnal Syntax Transformation* 2, no. 7 (2021).
- Zaim, H., E. Erzurum, S. Zaim, B. Uluyol, and G. Seçgin. "The Influence of Islamic Leadership on Work Performance in Service Industry: An Empirical Analysis." *International Journal of Ethics and Systems* 40, no. 1 (2022).